



BARANG MILIK NEGARA

Modul Pembelajaran SMP Terbuka PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kelas
IX



Modul 5

DEMOKRASI DI INDONESIA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



Modul Pembelajaran SMP Terbuka
**PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN**
Kelas IX

Modul 5
DEMOKRASI DI INDONESIA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama
2021

© Hak cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Modul Pembelajaran SMP Terbuka

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Modul 5:
Demokrasi di Indonesia
Kelas IX

Pengarah:

Mulyatsyah

Penanggung Jawab:

Eko Susanto

Kontributor:

Imam Pranata, Harnowo Susanto,
Ninik Purwaning Setyorini,
Maulani Mega Hapsari

Penulis:

Winarni

Reviewer:

Satar

Editor:

Didi Teguh Chandra, Amsor,
Agus Fany Chandra Wijaya, Hutnal Basori,
Sukma Indira, Kader Revolusi,
Andi Andangatmadja, Tri Mulya Purwiyanti,
Tim Layanan Khusus

Layout Design:

Ghina Fitriana,
Belaian Pelangi Baradiva,
Yan Mahdi Muhamad

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Modul Pembelajaran SMP Terbuka dengan baik. Tujuan disusunnya Modul Pembelajaran ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan penyediaan bahan belajar peserta didik SMP Terbuka agar proses pembelajarannya lebih terarah, terencana, variatif, dan bermakna. Dengan demikian, tujuan memberikan layanan SMP Terbuka yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka dapat terwujud.

Modul Pembelajaran SMP Terbuka yang telah disusun ini disajikan dalam beberapa kegiatan belajar untuk setiap modulnya dan beberapa modul untuk setiap mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan adanya modul pembelajaran SMP Terbuka ini, kami berharap, peserta didik dapat memperoleh kemudahan dan kebermaknaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran mandiri dan terstruktur. Selain itu, Guru Pamong dan Guru Bina pun dapat merancang, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik sebagai bagian dari proses peningkatan mutu layanan di SMP Terbuka. Dengan layanan SMP Terbuka yang bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya Modul Pembelajaran SMP Terbuka ini diharapkan kualitas layanan pembelajaran di SMP Terbuka menjadi lebih baik. Modul Pembelajaran SMP Terbuka ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap dapat memperoleh kritik, saran, rekomendasi, evaluasi, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan modul ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Modul Pembelajaran SMP Terbuka. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka dengan segala kerendahan hati akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2021
Direktur
Sekolah Menengah Pertama,



Drs. Mulyatsyah, M.M.
NIP. 196407141993041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
I. Pendahuluan.....	1
A. Deskripsi Singkat.....	1
B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	1
C. Petunjuk Belajar.....	2
D. Peran Orang Tua dan Guru	3
II. Kegiatan Belajar 1: Hakikat Demokrasi.....	5
A. Indikator Pembelajaran	5
B. Aktivitas Pembelajaran	5
C. Tugas.....	11
D. Rangkuman	12
E. Tes Formatif	13
III. Kegiatan Belajar 2: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	15
A. Indikator Pembelajaran	15
B. Aktivitas Pembelajaran	15
C. Tugas.....	24
D. Rangkuman	26
E. Tes Formatif	28
TES AKHIR MODUL.....	31
LAMPIRAN.....	37
A. Glosarium.....	37
B. Kunci Jawaban Tugas	39
C. Kunci Jawaban Tes Formatif	43
D. Kunci Jawaban Tes Akhir Modul.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Demokrasi untuk semua	6
Gambar 5.2 Ruang Sidang DPR/MPR.....	7
Gambar 5.3 Pemilihan Umum	7
Gambar 5.4 Hak asasi bidang Pendidikan	8
Gambar 5.5 Hak asasi bidang ekonomi	8
Gambar 5.6 Abdurrahman Wahid	9
Gambar 5.7 Musyawarah	10
Gambar 5.8 Musyawarah	11
Gambar 5.9 Musyawarah mufakat	16
Gambar 5.10 Majelis Permusyawaratan Rakyat	17
Gambar 5.11 Unjuk rasa	18
Gambar 5.12 Pemilu	19
Gambar 5.13 Demokrasi Parlementer.....	20
Gambar 5.14 Dekrit Presiden	21
Gambar 5.15 Tritura	22
Gambar 5.16 Rencana Pembangunan Lima Tahun	23
Gambar 5.17 Kebebasan Pers.....	23



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	1
Tabel 5.2 Hakikat Demokrasi.....	11
Tabel 5.3 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	25





I PENDAHULUAN



DEMOKRASI DI INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Semangat pagi Indonesia, Salam Pancasila!

Apa kabar Ananda yang hebat? Semoga Ananda sehat dan semangat dalam belajar, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Ananda bisa bersekolah hingga saat ini. Kali ini Ananda akan mempelajari Demokrasi di Indonesia yang merupakan modul kelima di kelas IX. Dengan mencermati dan mempelajari tentang Demokrasi di Indonesia, Ananda dapat menerapkan sikap bangga akan tanah air Indonesia sebagai wujud penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu agar Ananda lebih paham terhadap materi dalam modul ini, ikuti aktivitas belajar berikut.

B. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar (KD) merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai Ananda untuk suatu mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Berikut Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada pembelajaran Modul 5 ini.

Tabel 5.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti	Kompetensi Inti
<ol style="list-style-type: none">1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosuderal, dan metakognitif) pada tingkat teknik dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	<ol style="list-style-type: none">4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber belajar lain yang sama dalam sudut pandang teori/teori.

Kompetensi Dasar	Kompetensi Dasar
1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.	4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara.	
3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	

C. PETUNJUK BELAJAR

Sebelum Ananda menggunakan Modul Demokrasi di Indonesia ini terlebih dahulu Ananda baca petunjuk mempelajari modul berikut ini:

1. Pelajarilah modul ini dengan baik. Mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam modul Demokrasi di Indonesia di setiap kegiatan pembelajaran hingga Ananda dapat menguasainya dengan baik;
2. Lengkapilah setiap bagian aktivitas dan tugas yang terdapat dalam modul ini dengan semangat dan gembira. Jika mengalami kesulitan dalam melakukannya, catatlah kesulitan tersebut pada buku catatan Ananda untuk dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung;
3. Lengkapi dan pahami setiap bagian dalam rangkuman sebagai bagian dari tahapan penguasaan materi modul ini;
4. Kerjakan bagian Tes Formatif pada setiap bagian Kegiatan Belajar sebagai indikator penguasaan materi dan refleksi proses belajar Ananda pada setiap kegiatan belajar. Ikuti petunjuk pengerjaan dan evaluasi hasil pengerjaannya dengan seksama;
5. Jika Ananda telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan dengan mengerjakan Tes Akhir Modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak/Ibu Guru;
6. Gunakan Daftar Pustaka dan Glosarium yang disiapkan dalam modul ini untuk membantu mempermudah proses belajar Ananda.



D. PERAN ORANG TUA DAN GURU

Teruntuk Bapak/Ibu Orang Tua peserta didik, berkenan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menampung serta membantu memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh Ananda peserta didik. Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat diselesaikan, arahkanlah Ananda peserta didik untuk mencatatkannya dalam buku catatan mereka untuk didiskusikan bersama teman maupun Bapak/Ibu Guru mereka saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

Teruntuk Bapak/Ibu Guru, modul ini disusun dengan orientasi aktivitas peserta didik dan setiap modul dirancang untuk dapat mencakup satu atau lebih pasangan kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat pada kompetensi inti 3 (pengetahuan) dan kompetensi inti 4 (keterampilan). Setiap peserta didik diarahkan untuk dapat mempelajari modul ini secara mandiri, namun demikian mereka juga diharapkan dapat menuliskan setiap permasalahan pembelajaran yang ditemuinya saat mempelajari modul ini dalam buku catatan mereka. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Bapak/Ibu Guru dapat membahasnya dalam jadwal kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sehingga Ananda peserta didik dapat memahami kompetensi-kompetensi yang disiapkan dengan tuntas.

II

KEGIATAN BELAJAR 1



HAKIKAT DEMOKRASI

A. Indikator Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

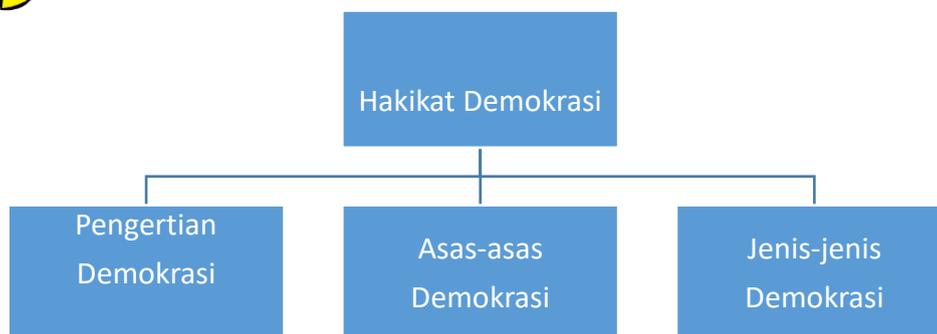
1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari hakikat demokrasi;
2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang hakikat demokrasi secara bertanggungjawab;
3. Mendeskripsikan pengertian demokrasi;
4. Mendeskripsikan asas-asas demokrasi;
5. Mendeskripsikan jenis demokrasi;
6. Menyusun laporan hasil kajian tentang hakikat demokrasi;

B. Aktivitas Pembelajaran



Ananda generasi hebat di seluruh wilayah Indonesia, bacalah uraian materi tentang hakikat demokrasi berikut ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud kepedulian Ananda dalam belajar. Dengan membaca secara teliti dan cermat, kelak akan berguna bagi Ananda agar menjadi warga negara yang baik dan memiliki kepedulian dalam meningkatkan kompetensi diri.

Sebelum Ananda mempelajari materi lebih jauh, Ananda silakan cermati cakupan materi yang akan dipelajari peta konsep Kegiatan Belajar 1 berikut:



Belajar tentang kedaulatan sebuah negara tidak pernah lepas dari proses demokrasi di negara tersebut. Sebuah negara yang menyatakan dirinya mengakui adanya kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. Lalu apakah hubungannya dengan demokrasi? Nah, silakan Ananda cermati pembelajaran tentang demokrasi berikut!



Aktivitas 1

Bagaimana pendapat anda tentang kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini? Mengapa hal ini begitu penting kita pelajari? Ya, karena setiap negara di dunia tidak ada satupun yang ingin di cap sebagai negara yang tidak demokratis. Semua negara berusaha untuk menerapkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraannya masing-masing. Ada yang menyatakan negara yang modern adalah negara yang menerapkan demokrasi di negara tersebut, artinya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan adanya pengakuan terhadap jaminan harkat dan martabat. Dua hal ini menjadi fondasi pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Bagaimana pandangan Anda terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah? Adakah kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum?

Nah, untuk memahami lebih mendalam tentang hakikat demokrasi, silakan Anda perhatikan gambar berikut ini.



Gambar 5.1 Demokrasi untuk semua

Sumber: <https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/22934/>

Selanjutnya silahkan Anda ceritakan hal apa saja yang Anda dapat maknai tentang gambar tersebut dan tulis pada kolom berikut ini!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang artinya pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Atau dapat dikatakan kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan makna dari kedaulatan rakyat.

Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis. Pemerintahan dibangun berdasar kehendak rakyat, atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi di sebuah negara akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi negara maupun budaya yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya melaksanakan demokrasi liberal, sedangkan Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila. Masing-masing negara menerapkan demokrasi sesuai dengan kondisi negaranya.

Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Beberapa istilah demokrasi menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan di suatu negara. Perkembangan demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi negara tersebut. Pembangunan demokrasi ini akan disesuaikan dengan asas-asas demokrasi yang berlaku universal antara Dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan asas-asas demokrasi. Adapun asas demokrasi terdiri dari tiga, yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan



Gambar 5.2 Ruang Sidang DPR/MPR
Sumber: <https://tirto.id/>



Gambar 5.3 Pemilihan Umum
Sumber: <https://news.detik.com/berita/d->

Partisipasi rakyat dalam pemerintahan ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan pemegang pemerintahan. Pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi rakyat di dalam pemerintahan karena menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil rakyat sekaligus menentukan kebijakan apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah.

Pemilihan wakil rakyat tersebut dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Rakyat diberikan kewenangan untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kebijakan publik yang disusun pemerintah dapat mewakili keinginan dan kepentingan rakyat.

Bagaimana tanggapan Ananda, jika dalam keluarga terdapat perbedaan pendapat/pandangan?

Tanggapan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Pengakuan harkat dan martabat manusia dapat ditunjukkan melalui tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Jaminan hak asasi manusia diatur dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

Jaminan hak yang dimaksud menyangkut hak-hak yang tercakup dalam hak asasi manusia seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, dan hak pribadi. Dalam pemahaman yang mendasar hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara.



Gambar 5.4 Hak asasi bidang pendidikan
Sumber: <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1192001>



Gambar 5.5 Hak asasi bidang ekonomi
Sumber: <http://searti.com/kliping-tentang-ham/hak-asasi-ekonomi>

3. Supremasi Hukum

Hukum memiliki kedudukan tertinggi, oleh karena itu semua warga negara tanpa kecuali harus patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukuman pemerintahan.



Gambar 5.6 Abdurrahman Wahid
Sumber: <https://www.bengkulutoday.com/>

Setelah Ananda mengkaji materi tersebut, silakan Ananda mencoba menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat Ananda tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Tuliskan pendapat Ananda pada kolom berikut!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ananda hebat, setelah mempelajari tentang pengertian dan asas-asas demokrasi, sekarang saatnya Ananda mempelajari tentang jenis-jenis demokrasi. Berikut ini Ananda dapat mempelajari beberapa jenis demokrasi:

1. Demokrasi menurut cara penyaluran aspirasi rakyat:
 - a. Demokrasi Langsung
Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang.
 - b. Demokrasi Tidak Langsung
Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.

Apa kelemahan dan kelebihan Demokrasi Tidak langsung yang diterapkan di Indonesia? Tulis jawaban Anda pada kolom berikut!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

a. Demokrasi Liberal

Demokrasi yang lebih mengutamakan kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi
- 2) Keputusan diambil dengan suara terbanyak
- 3) Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara (sekulerisme)
- 4) Keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya

b. Demokrasi Sosialis

Demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan negara. Demokrasi ini memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi
- 2) Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas
- 3) Tidak mengenal agama, karena tidak mengakui adanya Tuhan
- 4) Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan sebagalanya

c. Demokrasi Pancasila

Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai kepribadian bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat.

Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan;
- 2) Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat;
- 3) Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) Tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas;



Gambar 5.7 Musyawarah
Sumber: www.youtube.com

C. Tugas



Untuk lebih memantapkan pemahaman Ananda tentang Hakikat Demokrasi dalam pada Kegiatan Belajar 1 kali ini, Ananda silakan menjawab beberapa pertanyaan pada table berikut!

Tabel 5.2 Hakikat Demokrasi

<p>1. Jelaskan pengertian negara demokrasi?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>2. Apa saja asas-asas yang diterapkan dalam negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>3. Apa perbedaan antara demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>4. Apa makna Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>5. Berikan tanggapan dari gambar berikut!</p> <div data-bbox="387 1736 805 1908" data-label="Image">An illustration of three people (two women and one man) sitting around a table, engaged in a discussion. Above them is a grey banner with the text 'MUSYAWARAH KEKUATAN BANGSA' in bold, black and red letters, accompanied by a red flag icon.</div> <p>Gambar 5.8 Musyawarah Sumber: https://jalandamai.org/</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini! Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini!

Prinsip negara berkedaulatan rakyat berkiatan erat dengan pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* yang artinya dan *kratos* yang artinya

Abraham Lincoln menyatakan bahwa pengertian demokrasi adalah

Dalam pelaksanaannya, negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi menerapkan asas-asas antara lain, dan

Jenis-jenis demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara-negara di dunia berbedabeda. Jenis demokrasi berdasarkan, antara lain demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologinya, terdiri atas demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan

**Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!**

E. TES FORMATIF



Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada Modul Demokrasi di Indonesia Kegiatan Belajar 1 ini, kerjakan soal tes yang disediakan. Tes tertulis ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban.

Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

1. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* dan *kratos* yang artinya
 - A. kekuasaan negara
 - B. kekuasaan pemerintah
 - C. pemerintahan rakyat
 - D. pemerintahan berdaulat
2. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat
 - (2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
 - (3) Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan/eksekutif
 - (4) Kekuasaan mayoritas
 - (5) Tirani minoritasPemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang demokratis. Ciri-ciri pemerintahan yang demokratis ditunjukkan pernyataan nomor
 - A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (3), (4), dan (5)
3. Asas demokrasi yang berlaku universal antara lain mencakup
 - A. keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan
 - B. tingkat perbedaan tertentu di antara warga negara
 - C. tidak adanya kebebasan yang diakui warga negara
 - D. adanya penegakan hukum yang sepihak
4. Faktor yang tidak menyebabkan pelaksanaan demokrasi di berbagai negara berbeda-beda adalah....
 - A. Ideologi
 - B. latar belakang sejarah bangsa
 - C. budaya
 - D. jumlah pegawai negeri
5. Adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan
 - A. asas demokrasi
 - B. ciri demokrasi
 - C. pengertian demokrasi
 - D. bentuk demokrasi

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

1. Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 5. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai} : \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

2. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (d disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catat pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.



III

KEGIATAN BELAJAR 2

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Indikator Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia
2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara bertanggung jawab.
3. Mendeskripsikan dasar-dasar pelaksanaan musyawarah mufakat
4. Mendeskripsikan peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia
5. Mendeskripsikan pelaksanaan Pemilu di Indonesia
6. Mendeskripsikan pelaksanaan Demokrasi Parleментар di Indonesia
7. Mendeskripsikan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia
8. Mendeskripsikan pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa orde baru di Indonesia
9. Mendeskripsikan pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa reformasi di Indonesia
10. Menyusun laporan hasil kajian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia

B. Aktivitas Pembelajaran

Ananda hebat di seluruh wilayah Indonesia, sekarang kita menuju pada Kegiatan Belajar 2. Sialkan

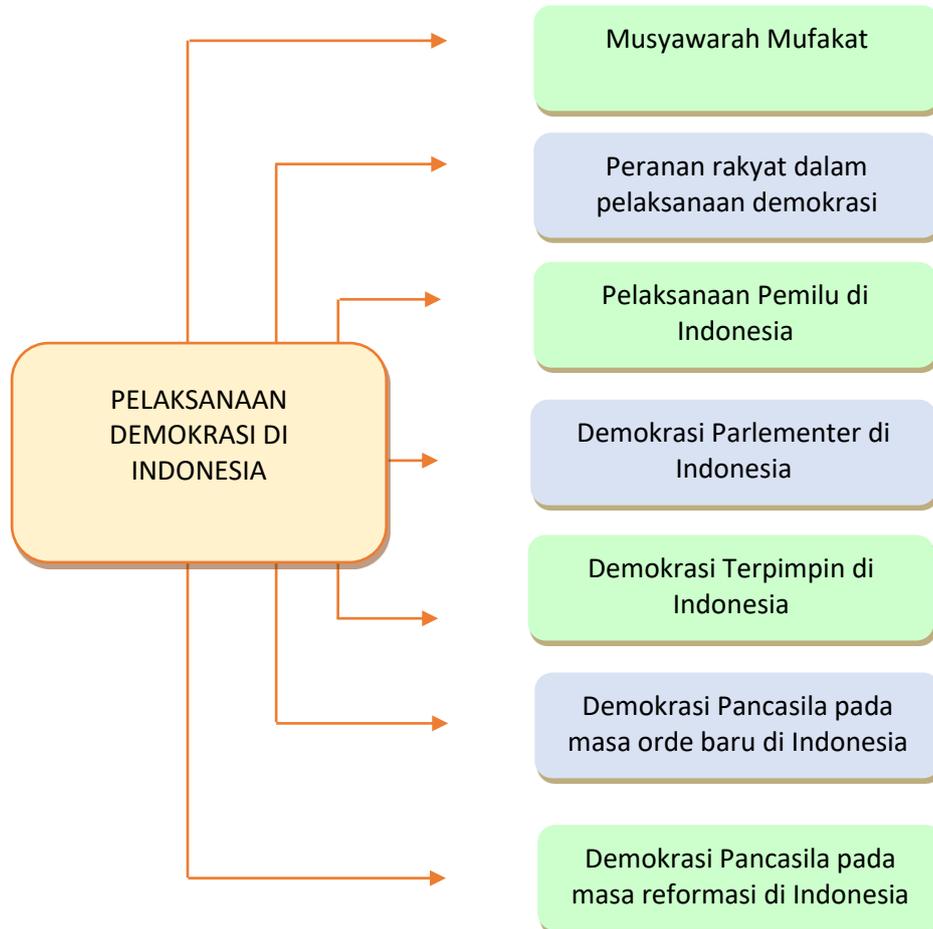
Ananda baca uraian materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia berikut ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud kepedulian Ananda dalam belajar. Dengan membaca secara teliti dan cermat, kelak akan berguna bagi Ananda agar menjadi warga negara yang baik dan memiliki tanggung rasa dalam meningkatkan kompetensi diri.





Aktivitas 2

Sebelum Anda mempelajari materi lebih jauh, Anda silakan cermati cakupan materi yang akan dipelajari peta konsep Kegiatan Belajar 2 berikut:



Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan menerapkan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 5.9 Musyawarah Mufakat
Sumber: <https://nalarpolitik.com/>

Penerapan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang paling tepat dilaksanakan di Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, yang sudah melekat dalam kebiasaan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Prinsip utama dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah dengan adanya setiap pengambilan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Musyawarah artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat artinya sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan

berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat dapat diartikan pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak, sehingga tercapai kebulatan pendapat.

Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat didasarkan pada beberapa hal antara lain:

1. Bersumber pada inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
2. Pengambilan keputusan berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan;
3. Berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur;
4. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
5. Keputusan dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui 2 cara yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung mengikutsertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Demokrasi langsung pada umumnya dilaksanakan di negara dengan wilayah kecil, masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks. Dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi contoh penerapan demokrasi langsung di Indonesia. Rakyat diberikan kesempatan secara langsung untuk memilih pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan negara Indonesia.

Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah penduduk dalam suatu negara yang senantiasa bertambah lebih banyak. Demokrasi representatif terlihat dalam proses pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II, DPRD tingkat I, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Pemilihan Umum legislatif. Wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat tersebut merupakan representasi dari rakyat Indonesia.

Bentuk peran serta rakyat dalam pelaksanaan demokrasi yang sekaligus merupakan wujud terlaksananya kedaulatan rakyat di Indonesia, dapat ditandai pada pelaksanaan ketatanegaraan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung (diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 6A ayat (1));
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014);
3. Pemilihan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 ayat (1));
4. Pemilihan Umum keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 19 ayat (1)).



Gambar 5.10 Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sumber:

<https://theconversation.com/id/topics/pemilu>

5. Pemilihan Umum keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22C ayat (1)).

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilaksanakan secara demokratis. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 5.11 Unjuk Rasa

Sumber: <https://www.suaramerdeka.com/>

Bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan tidak hanya dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum saja, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang lain seperti memberikan saran, usulan, kritik terhadap berbagai kebijakan publik yang disusun oleh pembuat kebijakan.

Penyampaian saran, usulan, kritik tersebut dapat disampaikan kepada wakil rakyat melalui berbagai media atau melalui penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini dilakukan demi keterlaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nah Ananda yang hebat di seluruh tanah air, Ananda pasti pernah menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau media cetak. Apa yang Ananda ketahui tentang kegiatan Pemilihan Umum di sekitar tempat tinggal Ananda? Bagaimana peran masyarakat di sekitar tempat tinggal Ananda dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut? Silakan Ananda ceritakan dan tulis pada kolom berikut!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara demokratis sesuai asas sebagai berikut:



Gambar 5.12 Pemilu

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d>

- a. **Langsung**
Pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan
- b. **Umum**
Pemilihan umum diikuti seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Bebas**
Semua warga negara yang telah memiliki hak dalam Pemilu, memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d. **Rahasia**
Suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia dan dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.
- e. **Jujur**
Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, peserta pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. **Adil**
Setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Ananda di manapun berada, sekarang akan dilanjutkan pembahasan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan di dalam penerapan demokrasi tersebut. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang terjadi, dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga penerapan demokrasi di Indonesia bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ingatkah Ananda terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di negara Indonesia tercinta ini? Sampai sejauh mana Ananda melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi dari awal kemerdekaan sampai era reformasi?

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Pada kurun waktu 1945 sampai tahun 1949, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi sistem Parlementer.



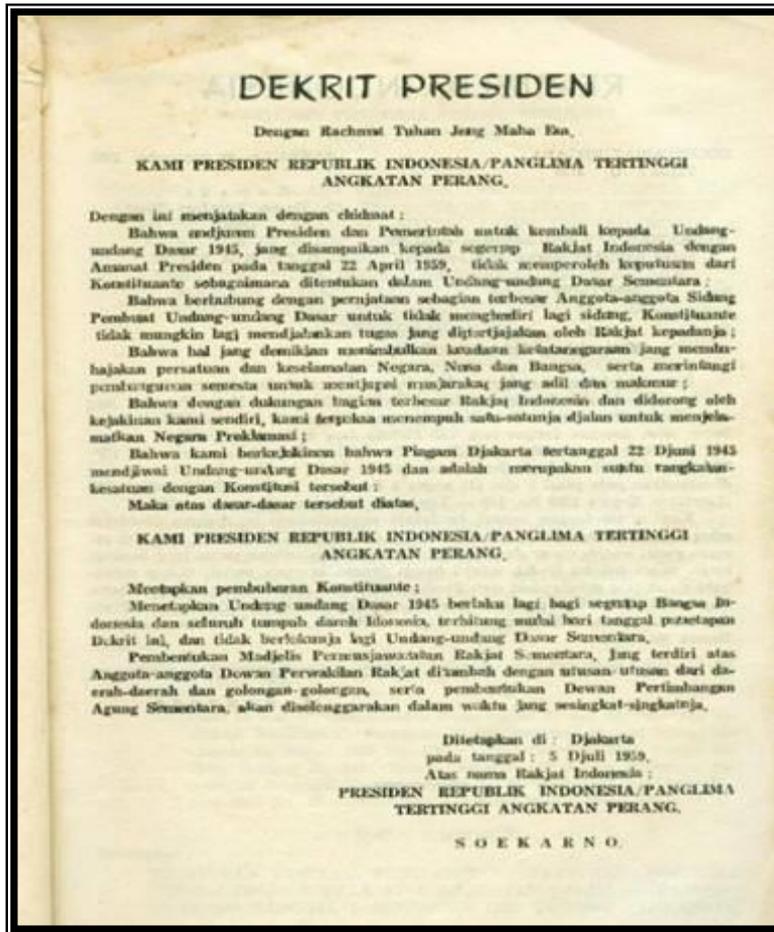
Gambar 5.13 Demokrasi Parlementer
Sumber: <https://www.sejarah-negara.com/>

Begitu pula pada saat Indonesia menerapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, demokrasi yang berjalan adalah demokrasi parlementer dengan sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri, Presiden hanya sebagai lambang saja.

Dikarenakan sebagian rakyat Indonesia menolak bentuk negara Serikat, pada akhirnya Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan menerapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, demokrasi parlementer tetap diberlakukan.

Namun dalam praktiknya, terjadi pergantian kabinet secara silih berganti. Hal ini dapat dinilai bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Dengan pergantian kabinet secara silih berganti, menyebabkan pembangunan tidak lancar, partai-partai lebih kepada mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini tentu saja akan membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan dapat terancam karena hal tersebut. Oleh karena itu Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:

- a. Pembubaran Badan Konstituante
- b. Berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950
- c. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)



Gambar 5.14 Dekrit Presiden

Sumber: <https://www.zonareferensi.com/>

2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil, pemerintahan menjadi lebih demokratis dan berfungsinya alat-alat perlengkapan negara. Demokrasi yang berjalan adalah Demokrasi Terpimpin. Makna demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun demikian Presiden menafsirkan “terpimpin” yaitu pimpinan terletak di tangan Panglima Besar Revolusi. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden yang pada akhirnya menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang puncaknya terjadi Perebutan kekuasaan oleh PKI tanggal 30 September 1965.

Namun kenyataannya, pelaksanaan demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyimpangan yang dimaksud antara lain:

- a. Presiden mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959;
- b. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR-GR pada 24 Juni 1960;

- c. Presiden melakukan pengintegrasian Lembaga-lembaga negara berdasarkan Penetapan Presiden No. 94 tahun 1962 tanggal 6 maret 1962 yaitu Ketua MPRS, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Wakil Ketua DPAS mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama, serta Ketua MA, wakil-wakil Ketua MPRS dan DPR-GR mendapat kedudukan sebagai menteri;
- d. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup melalui Tap MPRS Nomor III/MPRS 1963;
- e. Penyimpangan politik luar negeri, Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosial komunis;
- f. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jeles-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut menimbulkan instabilitas politik. Kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan negara yang tidak stabil menuai reaksi dari kalangan pemuda, mahasiswa, pelajar mengajukan Tiga Tuntutan rakyat (TRITURA):

- a. Bubarkan PKI;
- b. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI;
- c. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi.



Gambar 5.15 Tritura

Tuntutan rakyat mendapat tanggapan dari pemerintah dengan mengambil langkah nyata menciptakan keamanan dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tak lama kemudian, masa kepemimpinan beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto pada masa Orde Baru.

3. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru

Pelaksanaan demokrasi terpimpin praktis berakhir setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), dan dimulailah pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan orde baru. Demokrasi Pancasila berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan didasari pada nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi ciri khas dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Kelebihan dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia antara lain:

- a. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Masa Orde baru merupakan suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan tekad orde baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Masa orde baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden.

Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, diadakannya PEMILU, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan.

Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

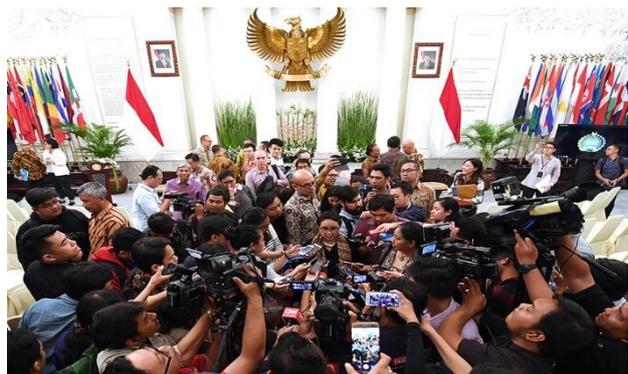


Gambar 5.16 Rencana Pembangunan Lima Tahun
Sumber: <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/>

Dalam pelaksanaannya Demokrasi pada masa orde baru memiliki kelemahan yaitu tidak dibatasinya masa jabatan presiden, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi, kolusi, nepotisme menjadi hal yang mengakibatkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila mengalami penyimpangan. Pembatasan kebebasan berbicara, pembatasan kebebasan pers semakin memperburuk pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa orde baru. Kondisi negara dalam bidang politik yang tidak stabil, mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang pada akhirnya menimbulkan gejolak dalam masyarakat terjadi kerusuhan tahun 1998. Mahasiswa menuntut segera dilakukan reformasi. Puncaknya pada tanggal 21 Mei Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan langsung digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

4. Demokrasi Pancasila pada masa Reformasi

Masa reformasi dimulai saat Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, dan lain-lain. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang.



Gambar 5.17 Kebebasan Pers
Sumber: <https://www.matamatapolitik.com/>

Demokrasi pada masa reformasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Termasuk juga menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada

prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi pada masa reformasi ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik, antara lain:

- a. kemerdekaan pers;
- b. kemerdekaan membentuk parpol;
- c. terselenggaranya pemilu yang demokratis;
- d. otonomi daerah;
- e. kebebasan berpolitik.

C. Tugas



Setelah Ananda mempelajari materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sekarang silakan Ananda melatih diri dengan mengerjakan tugas berikut. Sehingga wawasan Ananda tentang demokrasi akan makin lengkap.

1. Pasangkanlah pernyataan sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan yang sesuai dengan memberi tanda panah!

Asas umum dalam pemilu	Kurun waktu terjadinya demokrasi terpimpin
1959 - 1966	Pemilihan umum diikuti seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
Dekret Presiden 5 Juli 1959	Turunkan harga Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
Visi pemerintahan masa orde baru	Bubarkan PKI Turunkan harga dan perbaiki ekonomi Bersihkan kabinet dari unsur PKI
Penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945	Bubarkan Knstituante Berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945 Pembentukan MPRS dan DPAS
Isi Tritura	Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup

2. Jawablah beberapa pertanyaan berikut!

Tabel 5.3 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

a. Apa latar belakang pelaksanaan Demokrasi Parlementer di Indonesia pada kurun waktu 1945-1949?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b. Apa latar belakang terjadinya Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c. Bagaimana pendapat Anda dengan pelaksanaan Repelita pada saat penerapan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru?

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini! Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini!

Demokrasi Pancasila dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip utama dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah dengan adanya setiap pengambilan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat artinya sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat dapat diartikan.....

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui 2 cara yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas,,,, dan jujur serta adil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada kurun waktu 1945 sampai tahun 1949, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi sistem Parlemerter. Begitu pula pada saat Indonesia menerapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, demokrasi yang berjalan adalah demokrasi parlemerter dengan sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri, Presiden hanya sebagai lambang saja.

Persatuan dan kesatuan dapat terancam karena hal tersebut. Oleh karena itu Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:

- a.
- b.
- c.

Pelaksanaan demokrasi dipimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menimbulkan instabilitas politik. Kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan negara yang tidak stabil menuai reaksi dari kalangan pemuda, mahasiswa, pelajar mengajukan Tiga Tuntutan rakyat (TRITURA):

- a.
- b.
- c.

Kelebihan dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia antara lain:

- a. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Masa Orde baru merupakan suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan tekad orde baru yang ingin melaksanakan.....

secara murni dan konsekuen. Masa orde baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden.

Demokrasi pada masa reformasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Termasuk juga menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif.

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!

E. TES FORMATIF



Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada Modul Demokrasi di Indonesia Kegiatan Belajar 2 ini, kerjakan soal tes yang disediakan. Tes tertulis ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban.

1. Pengertian demokrasi adalah
 - A. pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat
 - B. pemerintahan yang berasal dari kehendak Tuhan
 - C. pemerintahan dimana penguasa boleh berbuat sewenang-wenang
 - D. pemerintahan yang dibatasi oleh kehendak rakyat
2. Terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi yang mengakibatkan Soekarno bersikap otoriter diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini terjadi pada masa
 - A. Demokrasi Pancasila
 - B. Demokrasi Liberal
 - C. Demokrasi Terpimpin
 - D. Orde Baru
3. Kelebihan dari nilai demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah
 - A. kelompok besar yang menentukan seluruh kebijakan
 - B. pemilik modal besar menguasai perekonomian bangsa
 - C. kelompok kecil menguasai segi kehidupan khusus kelompok besar
 - D. hak-hak warga negara dibatasi agar tercipta ketertiban
4. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan
 - (2) Memiliki wilayah negara
 - (3) Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
 - (4) Supremasi hukum
 - (5) Adanya pengakuan dari negara lainDari pernyataan tersebut, yang merupakan prinsip negara demokrasi ditunjukkan nomor
 - A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (3), (4), dan (5)
5. Makna azas bebas dalam pemilu adalah
 - A. semua warga negara bebas mengikuti Pemilu
 - B. semua warga negara yang memenuhi syarat sesuai perundangan berhak mengikuti Pemilu
 - C. peserta Pemilu bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
 - D. pemilih dalam pemilu diberikan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

1. Setelah Anda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 ini, silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 5. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Anda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai} : \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

2. Jika Nilai Capaian yang Anda peroleh kurang dari 75 (d disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan), Anda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catat pada buku catatan Anda bagian mana saja yang masih belum Anda pahami untuk kemudian Anda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Jika tingkat penguasaan yang Anda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Anda dapat melanjutkan ke Tes Akhir Modul.

TES AKHIR MODUL



Selamat, akhirnya Ananda sampai di Tes Akhir Modul!

Pilih salah satu jawaban A, B, C, dan D yang benar!

1. Pengertian demokrasi adalah....
 - A. Pemerintahan berdasarkan keinginan rakyat
 - B. Kekuasaan yang diinginkan oleh rakyat
 - C. Pemerintahan berdasarkan kebutuhan rakyat banyak
 - D. Kekuasaan seseorang yang sesuai keinginan rakyat
2. Makna Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
 - A. mengikuti perkembangan jaman
 - B. dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan
 - C. mengutamakan kepentingan rakyat
 - D. mendasarkan pada budaya Indonesia dan budaya asing
3. Akibat mengeluarkan pendapat yang tidak didasari rasa tanggung jawab akan menyebabkan
 - A. munculnya konflik dan persoalan baru
 - B. terancamnya kehidupan masyarakat
 - C. hilangnya norma kesusilaan dan kesopanan
 - D. munculnya kecemburuan sosial dalam masyarakat
4. Pentingnya kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
 - A. meningkatkan kemakmuran bangsa
 - B. mengatur pemerintahan dengan tertib
 - C. menciptakan masyarakat yang tertib dan aman
 - D. mengurangi jumlah angka kemiskinan
5. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Selalu berunjuk rasa setiap menuntut hak
 - (2) Menyelesaikan persoalan sesuai hukum yang berlaku
 - (3) Mengutamakan kepentingan kelompok dalam mengambil keputusan
 - (4) Musyawarah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan Undang-Undang Perwujudan nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ditunjukkan nomor
 - A. (1) dan (2)
 - B. (1) dan (3)
 - C. (2) dan (4)
 - D. (3) dan (4)

6. Landasan hukum pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia adalah
- Pembukaan UUD 1945 alinea 3 dan pasal 1 ayat 2
 - Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dan pasal 1 ayat 2
 - Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dan pasal 1 ayat 3
 - Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dan pasal 1 ayat 1
7. Perhatikan pernyataan berikut!
- Menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas
 - Menghapus semua perbedaan yang ada
 - Melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil
 - Menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil musyawarah
- Contoh sikap dan perilaku seseorang yang berjiwa demokrasi dalam pergaulan masyarakat ditunjukkan oleh nomor
- (1), (2), dan (3)
 - (1), (2), dan (4)
 - (1), (3), dan (4)
 - (2), (3), dan (4)
8. Perhatikan pernyataan berikut!
- Tidak menyuap pejabat negara
 - Melaporkan jika terjadi KKN
 - Memaksakan pendapat jika dibutuhkan
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan
 - Memberikan pendapat jika dibutuhkan
- Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam masyarakat ditunjukkan oleh nomor....
- (1), (2), dan (3)
 - (1), (2), dan (4)
 - (2), (3), dan (4)
 - (2), (4), dan (5)
9. Ciri utama dari demokrasi Pancasila dalam menyelesaikan masalah bersama senantiasa mengutamakan....
- pemungutan suara
 - musyawarah mufakat
 - kekuatan suara terbanyak
 - suara terkecil tapi menentukan
10. Perhatikan pernyataan berikut!
- Mengutamakan pendapat pimpinan rapat
 - Menghormati perbedaan pendapat
 - Tidak memotong pembicaraan orang lain
 - Tidak memaksakan pendapat
- Contoh sikap demokratis dalam musyawarah ditunjukkan nomor
- (1), (2), dan (3)
 - (1), (2), dan (4)
 - (1), (3), dan (4)
 - (2), (3), dan (4)

11. Manfaat kehidupan yang dilandasi oleh sifat demokratis adalah....
- Kebijakan pemerintah akan mendapat dukungan masyarakat
 - Hak asasi kurang mendapat perhatian
 - Aspirasi masyarakat kurang tersalurkan
 - Hukum sulit ditegakkan
12. Yang tidak termasuk contoh sikap dan perilaku seseorang yang berjiwa demokrasi dalam pergaulan masyarakat adalah....
- Menghormati pendapat orang lain
 - Menerima setiap hasil keputusan untuk kepentingan bersama
 - Menghilangkan semua perbedaan yang ada
 - Menggunakan hak pilih dalam pemilu
13. Perhatikan pernyataan berikut!
- Tidak memaksakan pendapat
 - Meghormati pendapat orang lain
 - Melaksanakan hasil keputusan dengan tanggungjawab
 - Selalu meminta pendapat orang lain
- Sikap demokratis dalam bermusyawarah ditunjukkan pernyataan nomor
- (1), (2), dan (3)
 - (1), (2), dan (4)
 - (1), (3), dan (4)
 - (2), (3), dan (4)
14. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966 keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan masyarakat terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yaitu

A	B
Bubarkan PKI Bubarkan Konstituante Bubarkan kabinet	Bubarkan PKI Bersihkan kabinet dari unsur PKI Turunkan harga dan perbaiki ekonomi
C	D
Bubarkan Konstituante Berlakunya UUD NRI Tahun 1945 Segera dibentuk MPRS dan DPRS	Bubarkan PKI Bubarkan Kabinet Berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945

15. Makna azas umum dalam pemilu adalah
- semua warga negara bebas mengikuti Pemilu
 - semua warga negara yang memenuhi syarat sesuai perundangan berhak mengikuti Pemilu
 - peserta Pemilu bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
 - pemilih dalam pemilu diberikan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

16. Pemilu di Indonesia secara periodik menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih calon-calon wakil mereka di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Proses pemilu dilaksanakan dengan aturan yang jelas dari pemerintah dengan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil) baik bagi peserta, pemilih maupun penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkompeten dan dipercaya oleh masyarakat dengan tertib dan damai. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan arti penting demokrasi bagi masyarakat adalah
- A. menjamin terselenggaranya proses pergantian kepemimpinan secara teratur, bukan atas dasar keturunan, mengangkat diri sendiri atau perebutan kekuasaan
 - B. menjamin terselenggaranya pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955 yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil)
 - C. menjamin terselenggaranya pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih anggota eksekutif, legislatif dan yudikatif
 - D. menjamin bahwa di Indonesia terdapat lembaga penyelenggara pemilu, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu
17. Perhatikan pernyataan berikut!
- (1) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
 - (2) Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain
 - (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - (4) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur
 - (5) Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama
- Perbuatan yang menunjukkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ditunjukkan pernyataan nomor
- A. (1), (2,) dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (3), (4), dan (5)
18. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa, pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menentukan arah pembangunan desa. Keinginan dari masyarakat pastinya bermacam-macam dan semua pihak ingin usulnya diterima. Disinilah letak pentingnya nilai-nilai luhur musyawarah diterapkan, bahwa dalam alam demokrasi perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar namun harus tetap saling menghormati perbedaan dan berusaha mencapai mufakat dengan prinsip mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Arti penting demokrasi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah
- A. menghasilkan penyelesaian perselisihan dengan damai dan secara melembaga
 - B. menjamin terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa
 - C. menjamin seluruh keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat diterima pemerintah
 - D. menjamin penentuan kebutuhan yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan desa

19. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Bubarkan PKI
- (2) Bubarkan Konstituante
- (3) Turunkan harga dan perbaikan ekonomi
- (4) Berlakunya kembali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (5) Segera dibentuk MPRS dan DPAS

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2,) dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (4), dan (5)
- D. (3), (4), dan (5)

20. Salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan demokrasi di berbagai negara berbeda-beda adalah

- A. ideologi, budaya, latar belakang sejarah bangsa
- B. kepentingan negara lain, ideologi, budaya
- C. budaya, politik luar negeri negara lain, kelengkapan perangkat pemerintahan
- D. jumlah pegawai negeri, kulaitas masyarakat modern, budaya

LAMPIRAN



GLOSARIUM

- amendemen : perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Amendemen umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi negara (amendemen konstitusional)
- bangsa : sekelompok manusia yang memiliki persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita bersama, serta mendiami wilayah tertentu
- bela negara : sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
- dasar negara : fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara
- Dekrit Presiden : keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan
- demokrasi : pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
- demokrasi parlementer : sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen; demokrasi parlementer; sekumpulan peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan dibuat oleh
- hukum : badan resmi negara yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas jika melanggarnya
- ideologi : kumpulan gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan; konsep yang berisi nilai-nilai dasar dan memberikan arah dan tujuan hidup; faham atau ajaran
- negara : suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

- politik : strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara
- rakyat : kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami wilayah negara
- UUD NKRI Tahun 1945 : hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia



Kunci Jawaban Tugas

KEGIATAN BELAJAR 1

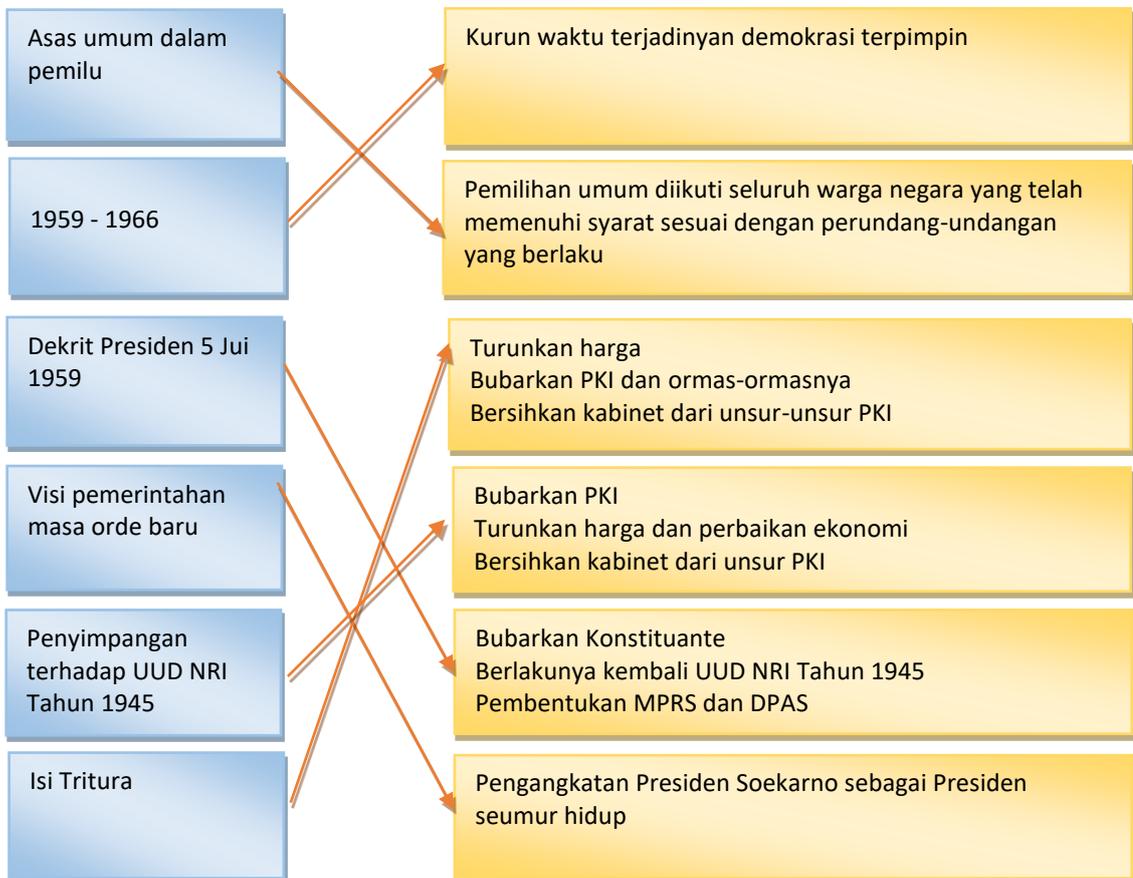
NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR
1	Pengertian negara demokrasi?	Negara demokrasi adalah negara dengan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara	5
2	Asas-asas yang diterapkan dalam negara yang menyatakan dirinya sebagai demokrasi	a. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia c. Supremasi Hukum	5
3	Perbedaan antara demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung	Demokrasi Langsung: sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi Tidak Langsung: sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.	5
4	Makna Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia	Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri antara lain: 1). Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan 2). Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat 3). Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara 4). Tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas	5
5	Musyawarah kekuatan bangsa	Musyawarah adalah kunci keterwakilan semua orang. melalui musyawarah dapatnya semua orang duduk bersama untuk sebuah tujuan. Musyawarah menjadikan kita semua saling kenal dan saling mengisi. Musyawarah	5

	itu sarana untuk bertukar ide dan gagasan. Selain itu, musyawarah juga menjadi modal kekuatan yang membuktikan bahwa dalam keberagaman semua keragaman dapat duduk bareng untuk kepentingan bangsa.	
TOTAL SKOR		25

$$\begin{aligned} & \text{Skor perolehan} \\ \text{Nilai} &= \frac{\text{-----}}{\text{Skor maksimal}} \times 100 \\ & 25 \\ \text{Nilai} &= \frac{\text{----}}{25} \times 100 \\ \text{Nilai} &= 100 \end{aligned}$$

KEGIATAN BELAJAR 2

1. Jawaban



2. Jawaban

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR
1	Latar belakang pelaksanaan Demokrasi Parlemerter di Inodnesia pada kurun waktu 1945 – 1949	Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi sistem Parlemerter.	5
2	Latar belakang terjadinya Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)	Kondisi Indonesia di tahun 1960-an sangat bergejolak. Presiden Soekarno memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Sikap anti neokolonialisme dan neoimperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan dari luar negeri di bidang politik maupun ekonomi	5
3	Pelaksanaan Repelita pada saat penerapan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru	Masa orde baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, diadakannya PEMILU, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan	5

	<p>pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>	
Jumlah Skor		15

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

$$\text{Nilai} = \frac{15}{15} \times 100$$

$$\text{Nilai} = 100$$



Kunci Jawaban Tes Formatif

KEGIATAN BELAJAR 1

NO.	KUNCI JAWABAN	PENJELASAN	SKOR
1	C	pemerintahan rakyat	2
2	A	Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan/eksekutif	2
3	A	keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan	2
4	D	jumlah pegawai negeri	2
5	A	asas demokrasi	2
JUMLAH SKOR			10

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$
$$\text{Nilai} = \frac{10}{10} \times 100$$
$$\text{Nilai} = 100$$

KEGIATAN BELAJAR 2

NO.	KUNCI JAWABAN	PENJELASAN	SKOR
1	A	pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat	2
2	C	Demokrasi Terpimpin	2
3	D	hak-hak warga negara dibatasi agar tercipta ketertiban	2
4	B	Partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM Supremasi hukum	2
5	C	peserta Pemilu bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun	2
JUMLAH SKOR			10

$$\begin{aligned} & \text{Skor perolehan} \\ \text{Nilai} &= \frac{\text{-----}}{\text{Skor maksimal}} \times 100 \\ & \text{10} \\ \text{Nilai} &= \frac{\text{----}}{\text{10}} \times 100 \\ & \text{Nilai} = 100 \end{aligned}$$



Kunci Jawaban Tes Akhir Modul

Pilihan Ganda

NO.	KUNCI JAWABAN	PENJELASAN	SKOR
1	A	Pemerintahan berdasarkan keinginan rakyat	2
2	B	dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan	2
3	A	munculnya konflik dan persoalan baru	2
4	A	meningkatkan kemakmuran bangsa	2
5	C	Menyelesaikan persoalan sesuai hukum yang berlaku Musyawarah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan Undang-Undang	2
6	B	Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dan pasal 1 ayat 2	2
7	C	Menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas Melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil Menghormati dan menjunjung tinggi keputusan hasil musyawarah	2
8	B	Tidak menyuap pejabat negara Melaporkan jika terjadi KKN Mengawasi pelaksanaan pembangunan	2
9	B	musyawarah mufakat	2
10	D	Menghormati perbedaan pendapat Tidak memotong pembicaraan orang lain Tidak memaksakan pendapat	2
11	A	Kebijakan pemerintah akan mendapat dukungan masyarakat	2
12	C	Menghilangkan semua perbedaan yang ada	2
13	A	Tidak memaksakan pendapat Meghormati pendapat orang lain Melaksanakan hasil keputusan dengan tanggungjawab	2
14	B	Bubarkan PKI Bersihkan kabinet dari unsur PKI Turunkan harga dan perbaiki ekonomi	2
15	B	semua warga negara yang memenuhi syarat sesuai perundangan berhak mengikuti Pemilu	2
16	A	menjamin terselenggaranya proses pergantian kepemimpinan secara teratur, bukan atas dasar keturunan, mengangkat diri sendiri atau perebutan kekuasaan	2
17	B	Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur	2
18	B	menjamin terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa	2

19	C	Bubarkan Konstituante Berlakunya kembali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Segera dibentuk MPRS dan DPAS	2
20	A	ideologi, budaya, latar belakang sejarah bangsa	2
JUMLAH SKOR			40

Skor perolehan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

40

$$\text{Nilai} = \frac{40}{40} \times 100$$

Nilai = 100

DAFTAR PUSTAKA

- Al Marsudi, Subandi. 2001. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Darmodiharjo, Darji. 1999. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hisyam, Muhammad, 2003, *Krisis masa kini dan orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Joko, Siswanto. 2006. *ABC PANCASILA*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM P. J.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Komalasari, Kokom. 2008. *Pendidikan Pancasila: Panduan bagi Para Politisi*. Surabaya: Lentera Cendekia
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- MPR RI. 2006. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI
- Surya Saputra, Lukman. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Suwarno, 2008, *Pancasila budaya bangsa Indonesia*, penerbit Kanisius

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama